

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), adalah nilai unsur produksi yang dibuat di Indonesia pada suatu produk barang dan jasa atau gabungan antara barang dan jasa dalam negeri dalam bentuk persentasenya. TKDN sendiri adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri, termasuk biaya pengangkutannya yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa di beberapa instansi pemerintahan. Khusus dalam bidang industri manufaktur, setiap perusahaan didorong pemerintah untuk terus meningkatkan penggunaan Komponen Dalam Negeri, contohnya dalam proyek-proyek *Engineering Procurement & Construction (EPC)*, karena untuk pengadaan (*Procurement*), banyak mesin dan alat-alat yang bahannya berasal dari luar negeri tapi perakitannya dilakukan di dalam negeri. Pemerintah akan memberikan insentif terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu yang dimasukkan dalam proses produksi pada berbagai jenis industri.

Pemerintah berharap untuk proyek-proyek yang akan dilakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Untuk itu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga, tetapi juga dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penyedia.

Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya mahasiswa di perguruan tinggi di Provinsi Jambi terus dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Salah satunya adalah mendorong minat mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Yayasan Nurul Islam (Yasni) Muara Bungo Jambi untuk tinggal di Rumah Susun (Rusun), dengan berbagai fasilitas yang berkualitas. Siap mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya generasi muda melalui pembangunan infrastruktur dan perumahan seperti rumah susun untuk

lembaga pendidikan tinggi. Direktorat Jenderal Perumahan telah melengkapi hunian vertikal tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung di Rusun seperti tempat tidur, lemari pakaian, meja, dan kursi belajar serta ruang pengolahan, dapur bersama serta fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Rusun ini yang mana menjadi asrama bagi mahasiswa selama belajar dan menuntun ilmu di perguruan tinggi. Yang mana dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman. Pembangunan Rumah Susun untuk mahasiswa IAI Yasni Bungo merupakan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas Pendidikan dan sumber daya manusia di Provinsi Jambi. Pada tahun 2022 lalu BP2P Sumatera IV juga telah menyelesaikan Pembangunan Rumah Susun mahasiswa Institut Agama Islam Yasni Muara Bungo. Harapannya bangunan ini bisa bermanfaat dan mahasiswa yang menghuni Rusun ini dapat merawat dan memelihara dengan sebaik-baiknya.

Lokasi Pembangunan Rusun berada di Jalan Lintas Sumatera KM 04, Sungai Binjai, Kecamatan Batin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Total Anggaran Pembangunan Rumah Susun (Rusun) senilai Rp 4,113 Miliar dan dibangun satu tower setinggi dua lantai dan memiliki 13 Unit hunian rusun lengkap dengan meubelair.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen dalam peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri seperti material dan peralatan konstruksi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan bangunan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah menggantikan aturan yang lama yakni UU Nomor 18 Tahun 1999. UU Jasa Konstruksi yang baru tidak hanya mengatur jasa konstruksi, melainkan mengatur rantai pasokan (*Supply Chain Management*) sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan.

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak akan terpisah dari persoalan pengadaan barang dan jasa. Tingkat Komponen Dalam Negeri merupakan nilai dari penggunaan barang atau jasa yang bersumber dari dalam negeri dari sebuah kegiatan. Tingkat Komponen Dalam Negeri dapat dilihat dalam pembuatan mesin baik bahan pembuatannya, prosesnya dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang digunakan. Apakah bahan yang digunakan berasal dari bahan baku dalam negeri,

prosesnya dilakukan di dalam negeri atau tidak, SDM yang digunakan, apakah pekerja asing atau pekerja lokal. Contoh diatas adalah salah satu ilustrasi bagaimana Tingkat Komponen Dalam Negeri ada pada suatu barang. Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2011, TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang dikurangi dengan harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.

Peraturan dalam PP No. 16 Tahun 2011 menjelaskan ketentuan dan tata cara perhitungan nilai TKDN. Sedangkan dalam PP No. 16 Tahun 2018 pasal 66 ayat 2 berisi kewajiban penggunaan produk dalam negeri minimal 40% (Seventinus, 2020). Pemenuhan nilai minimal kewajiban penggunaan produk dalam negeri membutuhkan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Nilai BMP diberikan dengan beberapa faktor, seperti sejauh apa perusahaan melibatkan usaha mikro dan kecil, termasuk koperasi kecil melalui kemitraan (Dwiwahjono, 2020). Nilai BMP maksimal adalah 15%, sehingga untuk memenuhi nilai 40%, harus ditutupi dari nilai TKDN. Hal tersebut yang menjadi standar nilai minimum TKDN sebuah barang atau jasa yang nilainya berkaitan dengan nilai BMP dan harus memenuhi standar minimal 40%.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri minimal 40% merupakan langkah pemerintah dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program P3DN sangat berkaitan dengan giatnya pemerintah mendorong usaha dalam negeri untuk pemenuhan nilai TKDN melalui sertifikat TKDN. Pemilik usaha dalam negeri akan mendapatkan keuntungan dari pemerintah jika barangnya memiliki sertifikat TKDN. Barang yang memiliki sertifikat TKDN akan dimasukkan kedalam barang prioritas di *Electronic Catalog*. Barang tersebut akan menjadi prioritas untuk digunakan oleh instansi pemerintah terutama yang menggunakan anggaran negara, seperti APBD atau APBN. Ini adalah wujud dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan penggunaan produk dalam negeri.

Lokasi Proyek Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Islam Yasni Bungo berada di Jalan Lintas Sumatera KM 04, Sungai Binjai, Kecamatan Batin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Total Anggaran Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Senilai Rp 4,11 Miliar dan dibangun Satu Tower setinggi 2 Lantai dan memiliki 13 Unit hunian rumah susun.



Gambar 1.1 Peta Lokasi Pembangunan Rumah Susun IAI Yasni Bungo
 Sumber : (Google Maps), Tahun 2023.

1.2 Manfaat dan Tujuan Penelitian

Tujuan :

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut :

1. Mengetahui nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada suatu pekerjaan Pembangunan Rumah Susun IAI Yasni Bungo.
2. Mengetahui perbandingan nilai % Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada suatu pekerjaan Standart dan Non–Standart pada Pembangunan Rumah Susun IAI Yasni Bungo.

Manfaat :

Adapun manfaat pada penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk mengetahui sebagai berikut : Mendapatkan pengalaman, pengetahuan, ketelitian, kerapian, wawasan, dan alur berpikir yang lebih cermat dalam proses perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) disuatu Instansi Pemerintahan khususnya pada Infrastruktur dan Perumahan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaplikasian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam suatu pekerjaan di lingkup Kementerian PUPR berdasarkan Kemenperin/P3DN dalam PP No. 16 tahun 2018.
2. RAB yang digunakan pada penelitian ini adalah RAB Proyek Pembangunan Rumah Susun IAI Yasni Bungo yang dipergunakan sebagai acuan dalam perhitungan.
3. Analisis nilai total persentase di tiap item pekerjaan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
Untuk memenuhi ketentuan Undang–Undang atau PP Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) maka, Pada proyek pembangunan ini belum diketahuinya nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri, Oleh sebab itu penelitian ini ditentukan untuk Mengetahui Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Pekerjaan Pembangunan Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo, Provinsi Jambi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini berisi tentang kerangka–kerangka acuan. Kerangka–kerangka acuan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Lokasi Proyek, Tujuan dan Manfaat, Batasan Masalah, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang dasar teori penulisan tugas akhir dan tentang metode–metode perhitungan yang akan digunakan dalam Perhitungan TKDN pada Proyek Pembangunan Rumah Susun.

BAB III METODOLOGI

Pada bab ini berisi tentang Langkah–Langkah dari Perhitungan TKDN pada Proyek Pembangunan Rumah Susun. Kemudian bab ini berisi tentang metode dan rumus yang digunakan dari rancangan penulis.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini merupakan data–data hasil dari perhitungan TKDN selama pengamatan berlangsung (Observasi) di Proyek Konstruksi, yaitu Perhitungan TKDN pada Proyek Pembangunan Rumah Susun.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini berisi tentang ringkasan dari semua hasil Perhitungan yang telah dilakukan. Dimana pada bagian ini menjadi jawaban dari tujuan penelitian serta mampu memberikan masukan untuk para pembaca atau penelitain selanjutnya.